



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Telaah Teoritis

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk bertindak atas namanya, untuk mengelola keuangan negara dan menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Masalah keagenan dapat muncul ketika terdapat asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian, penyimpangan, manipulasi informasi, atau ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya.

Syahrudin et al. (2025), menjelaskan prinsipal memperkerjakan atau mendelegasikan agen untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh agen untuk kepentingan terbaik prinsipal. Sejalan dengan pendapat Yunus *et al.* (2025), teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal, dimana agen bertanggungjawab melaksanakan tugas yang diberikan oleh prinsipal dengan imbalan tertentu. Konflik keagenan muncul karena perbedaan kepentingan antara keduanya, terutama dalam menghindari risiko. Dalam pemerintahan daerah, teori ini diterapkan sejak otonomi daerah 1999, dimana agen memiliki kewajiban untuk menjejahterakan prinsipal, meskipun sering memunculkan perbedaan preferensi. Oleh karena itu, dibutuhkan penyajian laporan keuangan yang sesuai peraturan dan



Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan mekanisme sistem pengendalian internal, guna meminimalisasi risiko keagenan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, *agency theory* menjadi landasan penting dalam menelaah bagaimana faktor-faktor internal Organisasi Pemerintah Daerah dapat meraih akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas hingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai hak publik untuk diketahui.

Menurut Zubaidah (2023), bahwa teori keagenan merupakan kontrak di mana satu atau lebih principal yang memberikan kewenangan kepada agen otoritas untuk membuat keputusan. Disini yang dimaksud dengan principal adalah publik atau masyarakat, sedangkan agen adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam instansi atau pemerintah. Teori keagenan dalam organisasi sektor publik menyatakan bahwa pemegang amanah pemerintah sebagai agen bertanggung jawab guna memberikan pertanggungjawaban, menampilkan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh tindakan yang dilakukan oleh mereka. Seperti mengawasi sumber daya keuangan terhadap pihak yang memberi amanah atau rakyat sebagai prinsipalnya yang berhak untuk meminta tanggungjawab tersebut.

Kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen (Rahmiyati, 2022).

Sudut pandangan teori diatas menghubungkan antara teori keagenan (*Agency Theory*) dengan penelitian ini, dimana pemerintah sebagai agen yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal pastinya menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana pengelolaan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah.

2.1.2. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan seseorang dan menerima hasilnya, kewajiban membela dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan pihak yang berwenang merupakan salah satu komponen akuntabilitas. Akuntabilitas lebih dari sekedar pelaporan, hal ini juga mencakup sikap terbuka dan jujur dalam semua tindakan individu atau organisasi, hal ini menyoroti betapa pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan. Sebagai alat pemantauan, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pilihan dan tindakan sejalan dengan norma dan harapan yang ditetapkan oleh mereka yang menduduki posisi



tanggung jawab. Untuk membangun hubungan timbal balik dan menjamin bahwa kekuasaan yang diberikan digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan, akuntabilitas mencakup proses dimana orang atau organisasi yang memiliki otorisasi atau kekuasaan harus menjelaskan tindakan mereka kepada pihak yang memberi mereka kekuasaan (Efrina et al., 2024).

Andriana (2024), menjelaskan akuntabilitas merujuk pada kewajiban bagi individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada publik atau pemangku kepentingan. Akuntabilitas menciptakan lingkungan dimana pemerintah dan institusi merasa terdorong untuk berinovasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik, karena mereka tahu bahwa setiap keputusan dan kebijakan akan dievaluasi dan diukur dampaknya. Maka dari itu, akuntabilitas yang baik akan memperkuat transparansi, partisipasi, dan efisiensi yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berujung pada peningkatan pembangunan berkelanjutan.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban individu atau unit organisasi yang mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta penerapan kebijakan yang dipercayakan kepadanya sehubungan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui media akuntabilitas. Akuntabilitas publik berarti kewajiban para pihak pemegang amanah atau mandat (*agent*) untuk memberi pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktifitas yang merupakan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, maka hubungan antara *agent* dan *principal* menuntut adanya keterbukaan



serta kejelasan informasi agar proses pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan akuntabilitas dapat diwujudkan secara optimal dan mencerminkan transparansi (Silooy, 2023).

Repitamala et al. (2023) memberikan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas diantaranya yaitu:

1. Pengelolaan Laporan Keuangan
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan
3. Pengendalian Internal

Rahmiyati (2022), menyatakan akuntabilitas sektor publik tidak bisa terlepas dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan atau aktivitas, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan



pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Tanpa akuntabilitas, akan sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah sumber daya publik telah dikelola dengan efektif dan efisien, atau apakah kebijakan yang diambil memang berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, akuntabilitas mendorong pihak yang berkuasa untuk tidak hanya melakukan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan keputusan mereka melalui proses yang transparan dan terukur (Andriana, 2024).

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Karianga (2023), dalam bukunya mengemukakan, pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan mengandung arti semua program pembangunan harus direncanakan dengan ketersediaan dana yang cukup, pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mencapai visi, misi dan program pembangunan yang direncanakan, pertanggungjawaban mengandung arti pejabat pengelola keuangan harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan benar dan dapat diterima oleh masyarakat.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparat daerah dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, memperkuat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepada masyarakat, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rahmiyati, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat dan pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Amalia, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai kelanjutan pemerintah untuk memperbaiki sistem keuangan pemerintah daerah, agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang



diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Theresiana & Supriyadi, 2025).

Rahmiyati (2022), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, prinsip pertanggung jawaban kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban seta pengawasan.
2. Transparansi, prinsip ini memiliki hak dan akses masyarakat dalam mengetahui informasi dan proses anggaran yang dilakukan aparatur daerah.
3. *Value for Money*, prinsip ini menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harus bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan DPRD mengenai kegagalan juga keberhasilannya sebagai bahan penilaian untuk tahun berikutnya. Masyarakat tidak saja sekedar berhak tau tentang pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun juga berhak menuntut pertanggungjawaban terhadap penerapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Silooy, 2023).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup pelaksanaan penganggaran dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan hukum, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika unsur-unsur tersebut berjalan dengan baik, maka informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih valid, relevan, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip *good governance*, yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah (Saputri et al., 2025).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Hal ini bertujuan agar setiap anggaran tidak dapat disalahgunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena keuangan daerah yang tidak akuntabel dapat mengarah pada penyalahgunaan dana publik, korupsi, dan ketidakseimbangan fiskal yang merugikan masyarakat (Fauzziyah et al., 2025).

Sejalan dengan Nagoro et al. (2024), yang menjelaskan pemerintah melakukan pertanggungjawaban atas laporan keuangan karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar dalam mengelola keuangan demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.1.5. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Asas umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum yang merupakan turunan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rahmiyati (2022), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, sebagaimana yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accoutability for probity and legality*), akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jumlah adanya kepatuhan terhadap hukum, norma yang berlaku dan peraturan lain yang di syaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, responsif, murah biaya, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.



4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan manfaatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

2.1.6. Laporan Keuangan

Mayasari et al. (2023), mendefinisikan laporan keuangan adalah catatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu entitas dan berisi informasi keuangan tentang suatu entitas untuk periode akuntansi. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam penelitian Ramadhan & Fahrani (2024), yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dikerjakan oleh



suatu entitas pelaporan selama periode pelaporannya. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, dengan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu dalam menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas, untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Ramadhan & Fahrani, 2024).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan daerah wajib menyajikan tujuh komponen laporan yang saling terkait:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos mengenai Saldo Anggaran Lebih (SAL).
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.



5. Laporan Operasional (LO), menyajikan pos-pos mengenai kegiatan operasional (pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit LO) suatu entitas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan perubahan ekuitas selama periode pelaporan.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam enam laporan utama, termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan keuangan kelak menjamin kejelasan dan meningkatkan akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah wilayah disajikan dengan lebih efisien apabila implikasi peningkatan realisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin kuat, semua informasi terkait harus dimasukkan dalam laporan keuangan untuk menjamin akuntabilitas publik (Syahrifa et al., 2025).

2.1.7. Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian laporan secara struktur tentang keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu instansi disebut sebagai penyajian laporan keuangan yang secara umum memiliki tujuan dalam memberi informasi tentang posisi keuangan entitas pelapor, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang dapat digunakan para pemakai membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya. Penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memberikan informasi penting mengenai kondisi keuangan entitas pelapor dan semua transaksinya dalam waktu pencatatan tertentu,.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Penyajian informasi yang utuh di dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Asmawanti et al., 2022).

Penyajian laporan keuangan sangatlah vital untuk dilakukan oleh entitas pelapor, karena merupakan sarana untuk memberikan kemudahan dalam menciptakan akuntabilitas publik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan secara komprehensif, dengan demikian pemerintah daerah yang dipercaya untuk mengelola sumber daya keuangan yang ada harus bisa memberikan pertanggungjawaban publik melalui penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap, jujur dan tepat waktu (Silooy, 2023).

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi yang akan mewujudkan akuntabilitas, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, dan semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Fauzziyah et al., 2025).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ardiana et al. (2024), menjelaskan laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Sedangkan andal adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Selanjutnya dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan yang terakhir dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Penyajian laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting dalam pertanggung jawaban daerah. Pemerintah daerah yang bertindak sebagai pelayan masyarakat diharapkan bisa menyajikan dan menyampaikan informasi keuangan dengan baik. Penyajian yang dilakukan daerah harus sesuai dengan peraturan standar akuntansi yang berlaku dengan memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan. (Ardiana et al., 2024).

Merujuk pada penelitian Silooy (2023), tujuan disajikannya laporan keuangan ialah untuk:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
2. Menyediakan informasi mengenai kesamaan cara untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan *budget* yang telah ditentukan.



3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang dipakai,
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan membiayai semua kegiatannya dan mencukupi keperluan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan terakit dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelaporan.

2.1.8. Indikator Penyajian Laporan Keuangan

Fauzziyah *et al.* (2025), yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, dimana kualitas penyajian ini diukur dengan 4 indikator utama:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya.
2. Andal, yaitu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dapat diverifikasi, serta menyajikan fakta secara jujur. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.



3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian pengguna.

2.1.9. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian *intern* sebagai proses integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus. Sistem Pengendalian Intern akan efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu instansi dengan menjadi bagian dari organisasi yang dikenal dengan istilah "*built-in*". Pengertian *built-in* adalah suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan, dan akan menyatu dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi (Indriyani et al., 2025).

Zai et al. (2024), menjelaskan pengendali internal adalah proses akuntansi dan audit yang digunakan di departemen keuangan yang memastikan integritas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Pengendalian internal membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa anggaran dipatuhi, kebijakan diikuti, kekurangan modal diidentifikasi, dan laporan akurat. Sedangkan sistem pengendalian internal adalah serangkaian proses dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif, laporan keuangan akurat, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi aset



organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan integritas informasi keuangan.

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, upaya untuk menciptakan dan meningkatkan sistem pengendalian internal merupakan salah satu cara dalam mencegah terjadinya kecurangan. Adanya sistem pengendalian internal yang optimal akan menjamin bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai peraturan aturan yang berlaku.

Sejalan dengan penelitian Silooy (2023), instansi pemerintah dituntut dan diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien, dalam upaya perwujudan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Diperolehnya keyakinan yang memadai, bahwa dana yang dipercayakan kepada pemerintah telah dikelola dengan baik, diwujudkan dengan peningkatan dalam:

1. Efisiensi dan efektivitas yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan/program kerja pemerintah.
2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/program yang lebih tepat waktu kepada *shareholders* dan juga *stakeholders*.



3. ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan, diwujudkan melalui semakin menurun atau berkurangnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan anggaran belanja negara.

Dalam penelitian Saniya et al. (2025), tujuan utama pengendalian ini adalah agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik, efisien dan sesuai prosedur, dalam hal ini pemerintah daerah dapat menginformasikan laporan keuangan pemerintah daerah, dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas publik dan kesalahan dapat harus segera dideteksi dan diperbaiki. Fungsi pengendalian internal ini sendiri adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pemeriksaan efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan memperhatikan aspek efektivitas biaya, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan pengembangan teknologi dan implementasikan secara kompresif.

Sejalan dengan penelitian Rahayu et al. (2024), untuk memastikan tujuannya tercapai, manajemen dan karyawan harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang efisien. Akibatnya, ketika pemerintah daerah menerapkan sistem ini dengan baik, hasilnya adalah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, ini disebabkan oleh fakta bahwa kekuatan sistem ini akan memastikan akurasi laporan keuangan.

2.1.10. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Muttaqien et al. (2024), yang didasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, indikator Sistem Pengendalian Internal (SPI) merujuk pada elemen yang dapat



digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Indikator SPI yang umum diukur meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator tersebut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Pimpinan dari suatu instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*), yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian suatu resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.
3. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), informasi merupakan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik dan guna informasi tersampaikan secara tepat, lengkap, dan berkesinambungan.
4. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dari suatu instansi pemerintah dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu telah dilakukan untuk meminimalkan resiko dalam mencapai tujuan.

5. Pemantauan (*Monitoring*), merupakan suatu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti, tidak hanya dilakukan secara berkala melalui kegiatan audit dan evaluasi, tetapi juga dapat dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari guna mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, kesalahan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan landasan empiris dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Revi Wilhemina Silooy (2023)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon)	Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Regresi Linier berganda	Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal berpengaruh



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		Jurnal Akuntansi Vol.9, No 2, Desember 2023, Hal 72-90 P-ISSN: 2656-3649		signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2.	Mayang Syahrifa, Febryandhie Ananda, Dewi Zulvia (2025)	Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah <i>Journal of Management and Business</i> Vol. 3 (1), E-ISSN: 3025-0471	Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisi regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3.	Fernanda Alivia Defana, Sri Rahayu (2023)	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021) Jurnal Ekombis, Vol. 11 No. 1 ISSN: 2338-8412 e-ISSN : 2716-4411	Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisi regresi linier berganda menggunakan software IMB SPSS versi 25	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	Fauzan Ari Yunus, Abdul Hadi, Sirat Hartaty Hadady (2025)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Vol 6 No 5 (2025) 1588-1607 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490	Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisi regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 26	Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
5.	Titin Eka Ardiana, Nanang Cendrion, Diana Pramudya Wardhani (2024)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo) Edunomika-Vol. 08, No. 04,2024	Penyajian Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Metode sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan analisis data menggunakan SmartPls 4.0 .	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6	Yelfa Fauziyyah, Ria Nellly Sari, Lila Anggraini (2025)	Peran Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pada Peningkatan Akuntabilitas	Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal,	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		Pengelolaan Keuangan Daerah. <i>Economic, Accounting, Management and Business</i> Vol. 8, No. 3, July 2025 p-ISSN 2615-3009 e-ISSN 2621-3389	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Data Regresi Linear Berganda Dengan Menggunakan SPSS Versi 26.	dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten indragiri hilir
7	Alim Ashari Muttaqien, Jamaluddn Majid, Nur Rahma Sari (2024)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating <i>Indonesian Journal of Taxation and Accounting</i> E-ISSN: 2988-6422 P-ISSN: 2988-4896	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah IBM SPSS 21	Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
8	Panji Nagoro, Anissa Hakim Purwanti, Nur Laila Yuliani (2024)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis regresi linear berganda	Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		<i>Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology</i> E-ISSN 2828-0725		
9	Muti'ah, Marsyaf, Bambang Subiyanto (2025)	<i>The Effect of Financial Statement Presentation, Public Transparency, and Internal Control Systems on Regional Financial Accountability.</i> IJRISS ISSN 2454-6186 Volume VIII	<i>Financial Statement Presentation, Public Transparency, Internal Control Systems on Regional Financial Accountability</i> <i>Analysis technique uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program</i>	<i>Financial Statement Presentation and the Internal Control System have a positive and significant effect on Regional Financial Accountability.</i>
10	Dewi Pudji Rahayu, Yanto, Emaridial Ulza, Renatha Rima Arvian (2024)	<i>The Influence of Internal Control Systems, Regional Financial Accounting Systems, Financial Report Presence, And Accessibility of Financial Reports on The Accountability of Financial Management In Tangerang Selatan Government.</i>	<i>Internal Control Systems, Regional Financial Accounting Systems, Financial Report Presence, Accessibility of Financial Reports, Accountability of Financial.</i> <i>Descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis uses SPSS 26.</i>	<i>Regional Government of South Tangerang City's Financial Management Accountability is affected by the Internal Control System, the Regional Financial Accounting System, Financial Reports' Accessibility, and Financial Statement Presentation.</i>

Sumber: Diolah dari beberapa penelitian terdahulu (2022-2025)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2022), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran akan mempermudah pemahaman dalam mencermati arah pembahasan dalam penelitian ini yang disertai dengan paradigma penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas antara keterkaitan variabel penelitian yang dilakukan.

Penyajian laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah yang disajikan secara *full disclosure* (pengungkapan penuh) bermanfaat bagi semua pihak dalam mengambil keputusan sehingga hak-hak publik dapat terpenuhi yakni hak untuk mengetahui, hak untuk diberikan informasi dan hak untuk aspirasinya didengar. Jadi, apabila penyajian laporan keuangan mengungkapkan perbedaan anggaran dan realisasinya yang disertai dengan penjelasan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian dari setiap anggaran yang sudah ditetapkan dinilai telah memenuhi unsur akuntabilitas (Silooy, 2023).

Dalam penelitian ini tidak hanya penyajian laporan keuangan yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal juga dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang agar dapat meminimalkan risiko yang ada, sistem pengendalian internal ini sangat diperlukan didalam pemerintahan agar terhindar dari kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak-pihak didalam sebuah instansi pemerintahan tersebut (Muttaqien et al., 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

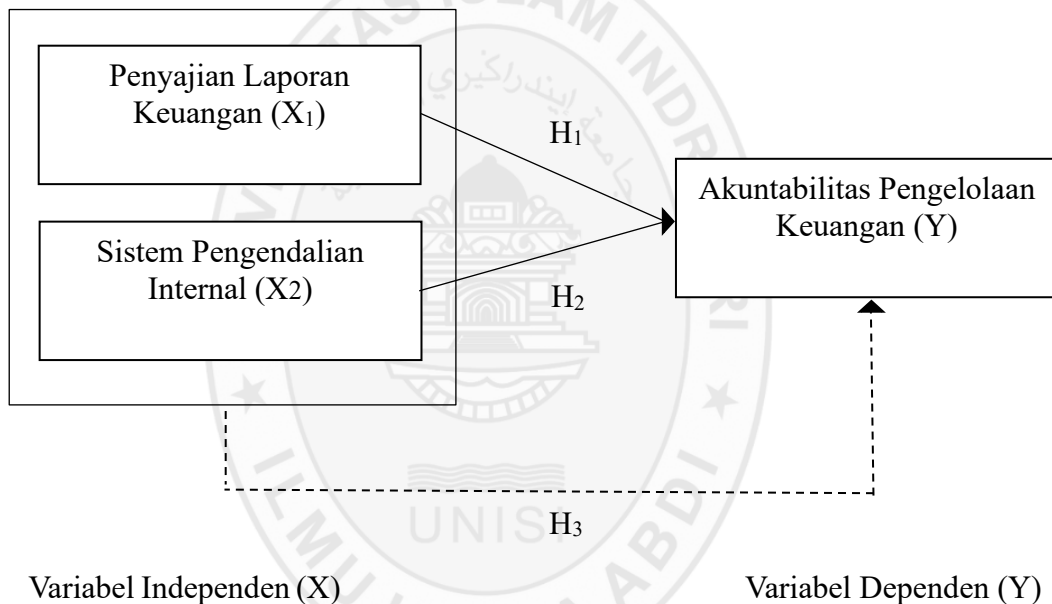
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal penting untuk diteliti karena daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya meningkatkan akuntabilitas daerah. Sehingga penelitian ini ingin melihat apakah benar penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- ▶ Parsial
- ▶ Simultan



2.4. Hipotesis

Sugiyono (2022), mendefinisikan hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan atau pernyataan sementara yang masih perlu diuji melalui penelitian lebih lanjut. Hipotesis berperan sebagai jawaban awal atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Keberadaannya tidak hanya membantu peneliti dalam memfokuskan studi, tetapi juga memungkinkan dilakukannya pengujian empiris untuk membuktikan hubungan atau pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan (Sijal, 2024).

Berdasarkan telaah teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis berdasarkan penjabaran diatas, maka Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Diduga Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir
- H₂ : Diduga Sistem Pengendalian Intenal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir
- H₃ : Diduga Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.